

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 4

Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat

- Golkar : Tak Menjamin Bebas Korupsi
- Demokrat : Kami Siap Diaudit BPK

JAKARTA (MJ)-Pemerintah memastikan menaikkan dana partai politik dari semula Rp 108/suara menjadi Rp 1.000/suara. Golkar menyebut kenaikan dana parpol belum menjamin partai akan bebas korupsi.

"SIAPA yang bisa menjamin korupsi dan tidak korupsi?" ujar anggota Fraksi Golkar M Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8) dikutip detikcom.

Menurut Misbakhun, kenaikan dana parpol tak berkorelasi dengan korupsi yang dilakukan anggota partai. Menurutnya, kenaikan dana parpol memang diperlukan mengingat biaya berdemokrasi di Indonesia yang tergolong mahal. "Korupsi-tidak korupsi bukan sebuah implikasi langsung antara naiknya dana parpol," tegas Misbakhun.

"Harga satu suara sah perlu dinaikkan karena untuk memperoleh satu suara sah dibutuhkan biaya yang sangat banyak," jelas dia.

Kenaikan dana parpol itu menurut

Misbakhun dapat dipakai partai-partai untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan pengeluaran bulanan. Biaya kaderisasi, koordinasi dan tugas-tugas kepartaian lain dapat diakomodir dari dana parpol yang naik 10 kali lipat ini.

Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan Golkar komitmen mencegah praktik KKN di negeri ini. Kenaikan dana parpol menurutnya tak relevan jika dikaitkan dengan komitmen suatu partai dalam melawan korupsi.

"Kami di Partai Golkar berkomitmen sejak awal tanpa kenaikan biaya suara pun yang ditanggung oleh APBN, Golkar sejak awal ingin mengawal proses pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN," katanya.

Partai Demokrat Siap Diaudit BPK

Seperti dilansir detikcom, Partai Demokrat menyambut positif kenaikan dana parpol. "Ya saya pikir itu memungkinkan untuk, pertama untuk kemandirian partai, bisa betul-betul lebih bagus. Kalau intinya kan untuk mencegah korupsi dan independensi partai," ujar Waketum Demokrat Syarif Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Menurut Syarif, kenaikan dana ini akan memberi dampak positif bagi parpol-parpol untuk bekerja. Keputusan menaikkan dana parpol dapat membuat proses demokrasi lebih baik. Syarif mengatakan kenaikan dana parpol ini tak dapat dikatakan terlalu besar atau kecil. Intinya, kata dia, keputusan pemerintah menyetujui kenaikan dana parpol membuktikan negara masih mampu dalam hal anggaran.

"Ternyata APBN kita sekarang ini dengan angka Rp 1000/suara memungkinkan untuk pemerintah mendukung. Saya pikir ini bagus buat demokrasi kita," ucap Syarif.

Terkait masalah transparansi penggunaan dana parpol, dia mengatakan banyak cara untuk mengecek apakah ada penyelewengan dana parpol ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

menurut Syarif bisa mengaudit parpol.

"Ya BPK kan sebagai auditor negara boleh saja, silakan saja," kata anggota Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik. Kenaikan dana parpol ini salah satunya didasari rekomendasi dari KPK. Usulan KPK bahkan lebih besar dibanding kenaikan yang diterapkan oleh Sri Mulyani.

"KPK lebih besar sedikit, yakni Rp 1.071 per suara sah. Tapi kita sudah evaluasi. Dulu per setiap suara sah hanya dinilai Rp 108 perak, sekarang naik jadi Rp 1.000," papar Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8).

KPK pun meminta agar kenaikan dana bantuan dapat dimanfaatkan oleh parpol-parpol untuk hal-hal positif. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga senada dengan Syarif Hasan soal pengauditan.

"Karena itu dana pemerintah, makanya harus diaudit juga supaya sesuai dengan peruntukannya," ucap Saut ketika dimintai konfirmasi. (dte/ary)